

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari tesis ini. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat atau signifikansi penelitian. Berikut ini disajikan uraian tiap bagian dari bab pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang sampai saat ini masih terus berupaya melanjutkan usaha pembangunan disegala bidang. Sebagai salah satu negara yang baru-baru ini mengalami guncangan hebat akibat krisis ekonomi yang berakhir pada krisis multidimensional, Indonesia masih harus banyak mengkonsentrasikan dirinya pada permasalahan pembangunan di berbagai bidang secara terencana dan bersungguh-sungguh. Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari suatu masyarakat dengan memenuhi berbagai kebutuhan anggota masyarakat, baik kebutuhan material maupun spiritual yang kemudian akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan nasional, tujuan dari pembangunan nasional salah satunya dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan akan mengangkat derajat seseorang. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan atau cita-cita yang ingin dicapainya harus dinyatakan secara jelas, sehingga semua pelaksanaan pendidikan memahami atau mengetahui semua proses kegiatan pendidikan.

Sejalan dengan pendapat tersebut lebih lanjut Joesoef dalam Sindhunata (2001, hlm 15) memandang bahwa pembangunan nasional tidak tergantung keadaan sumber daya alam, seperti yang dikemukakan bahwa

Suatu pembangunan nasional tidak hanya tergantung pada sumber-sumber dan kekayaan alam yang terkandung oleh bangsa yang bersangkutan, antara daratan dan lautan suatu negara dengan pendapatan perkapita yang dimiliki rakyatnya, terdapat suatu variabel penting yang menghubungkan keduanya, variabel tersebut adalah pendidikan.

Berdasarkan kutipan diatas, bahwa pembangunan nasional tidak hanya bergantung kepada sumber daya alam, sumber daya manusia atau pendapatan yang dimiliki oleh rakyatnya, tetapi terdapat sebuah variabel yang menghubungkan keduanya yaitu pendidikan. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Schumacher, E.F (1979, hlm.3) bahwa "...pembangunan tidak dimulai dengan barang tetapi dimulai dengan manusianya, pendidikannya, organisasinya serta disiplin...". Manusia yang pada akhirnya menentukan karakter dan langkah ekonomi dan sosialnya, bukan terletak pada modal dan bukan pula sumber-sumber materialnya. Jelaslah bahwa faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan suatu negara.

Hubungannya dengan pernyataan diatas, tidaklah mengherankan jika pembangunan sumber daya manusia kemudian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh lapisan bangsa, karena bagaimanapun juga pendidikan merupakan sarana penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan sebagai salah satu tujuan yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan sarana yang paling tepat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan sepenuhnya pada anak didik yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan diri menjadi manusia seutuhnya, manusia yang mampu memahami hakekat kehidupan secara menyeluruh. Pendidikan

sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Proses pendidikan yang berlangsung di sekolah yang mengutamakan proses pembelajaran yang pada akhirnya membentuk karakter siswa. Pendidikan bukan sekedar proses memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari seorang pendidik kepada peserta didik. Pendidikan juga dimaknai sebagai proses mentransfer nilai (*transfer of values*) dan kerja budaya yang menuntut kreativitas peserta didik untuk menjadi manusia sejati. Faktanya pendidikan di Indonesia saat ini kualitasnya masih rendah, posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN masih jauh tertinggal. Berbagai masalah terjadi dalam pendidikan kita saat ini seolah-olah menjadi hal yang sangat rumit untuk penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Khudlarin (2012) yang menyatakan bahwa

UNESCO meletakkan Indonesia dengan *Human Development Index (HDI)* pada urutan ke-112 diantara 174 negara yang diteliti, sedangkan *The Political And Economic Risk Consultancy (PERC)* yang berpusat di Hongkong telah menempatkan sistem pendidikan di Indonesia pada urutan ke 12 diantara berdasarkan 12 negara yang diteliti.

Berdasarkan hasil survey diatas, membuktikan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Berbagai masalah muncul dalam pendidikan kita saat ini, diantaranya kualitas guru yang rendah, perubahan kurikulum, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tingakt kecerdasan siswa yang dianggap masih kurang dibuktikan dengan standar kelulusan ujian nasional kita masih jauh dibawah Malaysia.

Permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan masih terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi pendidikan di Indonesia tidak memadai lagi untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Harus dilakukan transformasi paradigma pendidikan di Indonesia. Paradigma pendidikan yang ditawarkan adalah paradigma pendidikan multikultural sebagai pengganti paradigma pendidikan yang monokultural. Tawaran tentang pentingnya pendidikan multikultural ini dalam batas tertentu mendapat respon yang positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat multikultural (Bab III, pasal 4, ayat 1). Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana yang termaktub pada Bab III pasal 4, ayat 1 “...pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa...”. Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat nilai-nilai pendidikan multikultur yang terdapat dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berangkat dari fakta sejarah, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang multikultural terbesar di dunia, kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari sosio- kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Indonesia dengan jumlah pulau yang ada diwilayah NKRI sekitar kurang lebih 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Indonesia juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, serta berbagai macam kepercayaan lainnya.

Keragaman ini diakui atau tidak, dapat menimbulkan berbagai macampersoalan seperti yang sekarang ini dihadapi bangsa ini. Indonesia dihadapkan pada masalah korupsi, kolusi, *nepotisme*, *premanisme*, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, *separatisme*, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentuk

nyata dari multikulturalisme itu. Faktanya, keadaan yang terjadi saat ini keberagaman yang di Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam persoalan, korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan. Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi semata, melainkan juga oleh krisis nilai moral. Masalah yang terjadi di Indonesia, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa merajalela, seperti perkelahian, perusakan, pemerkosaan, minum-minuman keras dan bahkan pembunuhan. Keadaan seperti itu, terutama krisis nilai moral terjadi, salah satu penyebabnya adalah kurang berhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda bangsanya.

Berbagai macam masalah yang ditimbulkan akibat keberagaman yang ada di Indonesia terus dibiarkan, maka niscaya kehancuran bangsa ini hanya tinggal menunggu waktu saja, sebagaimana pendapat Lickona (1992) mengemukakan sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan kehancuran suatu bangsa, yaitu

Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, ketidakjujuran yang membudaya, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orangtua, guru dan figure pemimpin, pengaruh *peer group* terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, kebiasaan penggunaan bahasa yang buruk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, meningkatnya perilaku merusak diri dan semakin kaburnya pedoman moral.

Berdasarkan kutipan diatas, apabila dicermati ternyata kesepuluh tanda-tanda tersebut sudah ada di Indonesia, yang menyebabkan rendahnya kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional adalah cerminan dari perilaku individu-individu yang tidak memiliki karakter. Penyebabnya adalah karena gagalnya dunia pendidikan kita mencetak peserta didik yang mampu menjadi manusia seutuhnya. Kesepuluh tanda seperti yang diuraikan diatas akan diuraikan dengan ciri yang pertama, adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Faktanya sebagaimana yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm. 8) yaitu

Data Polda Metro Jaya: Tahun 1998 di Jakarta tercatat 230 kasus tawuran (15 meninggal, 34 luka berat, 108 luka ringan). Pada tahun 1998 ada 97 sekolah di Jakarta yang terlibat tawuran. Hasil penelitian di 5 SMK-TI Bogor (GMSK-IPB dengan jumlah sampel 903 siswa menunjukkan bahwa 66,7% terlibat tawuran: 48,7% menggunakan batu 26% memukul dengan alat (kayu, besi dll), 1,7% menikam dengan senjata tajam.

Berdasarkan kutipan diatas, peristiwa tawuran menunjukkan tingkat keprihatinan yang tinggi, oleh karena itu Dinas Pendidikan menerapkan jumlah jam efektif selama pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, termasuk tawuran. Ciri dari ambruknya suatu bangsa yang kedua ditandai penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata-kata yang kasar yang membuktikan adanya pergeseran nilai sosial. Fenomena pergeseran nilai sosial di Indonesia telah terjadi, sebagaimana ciri yang kedua yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm. 8), yaitu

Perubahan bahasa ke arah penggunaan kata-kata kasar dan buruk adanya indikator dari adanya perubahan sosial yang memburuk. Membudayanya bahasa “*prokem*” di kalangan remaja dan bahasa-bahasa kasar adalah bukti telah terjadinya pergeseran sosial ini.

Berdasarkan kutipan diatas, penggunaan bahasa dikalangan remaja, seperti penggunaan bahasa binatang mereka menganggap sebagai suatu yang wajar. Penggunaan bahasa-bahasa binatang yang diucapkan di lingkungan sekolah pun mereka menganggapnya sebagai hal yang lumrah, padahal tidak semestinya ketika para remaja menggunakan bahasa-bahasa binatang di lingkungan pendidikan. Ciri dari tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, yang ketiga adalah pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindakan kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus tawuran antar pelajar sebagaimana yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm. 9) menjelaskan

Dari 230 kasus tawuran di Jakarta pada tahun 1998, hampir 2000 remaja yang terlibat ditahan. Banyaknya gang di kalangan remaja yang mempunyai solidaritas tinggi (25% dari 203 responden di 5 SMK-TI Bogor mengaku anggota gang). Selain itu, 66% dari peserta tawuran mengatakan bahwa alasan mereka melakukan tawuran adalah karena solidaritas.

Berdasarkan data diatas, alasan solidaritas seringkali dijadikan alasan pembenaran mereka melakukan tawuran. Para pelaku tawuran yang mengatasnamakan solidaritas tidak merasa menyesal ketika telah menyakiti musuhnya. Ciri yang selanjutnya, yang keempat dari ciri-ciri kehancuran suatu bangsa, adalah meningkatnya perilaku merusak diri yang ditandai dengan minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba sebagaimana yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm. 9) sebagaimana hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut

Data dari 5 SMK-TI di Bogor seperti dikutip diatas menunjukkan pula hasil yang sangat mengejutkan, yaitu: 30,3% terlibat minuman keras (27% bahkan sampai mabuk), 15,4% pecandu narkoba, 34,6% berjudi/taruhan, 68% menonton film porno (*blue film*), 3,2% pernah melakukan hubungan seks.

Berdasarkan kutipan diatas, perilaku merusak diri, seperti terlibat minuman keras, pecandu narkoba, berjudi/taruhan, bahkan menonton film biru bahkan sampai melakukan hubungan seks bagaikan rangkaian masalah yang terus menggerogoti remaja kita pada saat ini. Tanda-tanda dari hancurnya suatu bangsa yang kelima, adalah semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, yang ditandai dengan sifat pembohong, tidak memiliki rasa empati dan memiliki perasaan puas ketika sudah menyakiti lawannya. Sebagaimana yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm. 9) "...tidak merasa bersalah ketika berbohong atau mencuri, tidak ada rasa empati terhadap lawan tawuran, bahkan mereka puas dan bangga apabila telah menyakiti lawan...". Berdasarkan uraian tersebut remaja seringkali berbohong, mencuri dan tidak memiliki rasa empati yang ada perasaan puas ketika sudah menyakiti lawannya.

Tanda-tanda hancurnya suatu bangsa yang keenam, adalah menurunnya etos kerja yang ditandai dengan perilaku siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), membolos ketika jam sekolah sebagaimana yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm. 9) yaitu "...87% sering tidak mengerjakan PR, 75% sering membolos, 33% keluyuran dengan kawan pada pada waktu jam sekolah,

57% gemar duduk-duduk di pinggir jalan...”. Perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku yang lumrah yang terjadi pada para remaja. Tanda-tanda hancurnya suatu bangsa yang ketujuh, adalah semakin rendahnya rasa hormat kepada Orang tua dan guru sebagaimana yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm. 10) menjelaskan bahwa “...hampir semua guru merasakan adanya penurunan rasa hormat dan sopan santun di kalangan anak didiknya...”. Peserta didik sering membolos, keluyuran ketikan jam pelajaran dan gemar duduk-duduk di pinggir jalan, bahkan menurunnya rasa hormat terhadap guru. Perilaku tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik.

Tanda-tanda hancurnya suatu bangsa yang kedelapan, adalah rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, yang ditandai dengan banyak perilaku coret-coret di tempat umum, dan perilaku membuang sampah secara sembarangan sebagaimana yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm. 10) yaitu

Sering terjadinya *vandalism* (20% remaja di SMK-TI Bogor mengakuinya. Banyaknya terlihat coret-coret di tempat umum, banyaknya remaja yang berperilaku tidak peduli (cuek) atau “*memangnya gue pikirin*”, sampah bertebaran yang dilakukan baik oleh remaja dan orang dewasa.

Berdasarkan kutipan di atas, perilaku yang sering dilakukan remaja dimanapun itu, yaitu perilaku membuang sampah sembarangan dan mereka menganggap perilaku tersebut merupakan hal yang wajar atau biasa. Tanda-tanda hancurnya suatu bangsa yang kesembilan, adalah membudayanya perilaku ketidakjujuran yang ditandai dengan perilaku membohongi orang tua dan perilaku curang yang dilakukan oleh oknum guru yang memberikan jawaban kepada siswa ketika ujian berlangsung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Megawangi (2004, hlm. 10) yaitu

Dari data SMK-TI Bogor juga menunjukkan bahwa: 81% sering membohongi orang tua, 30,6% pernah memalsukan tanda tangan orang tua/wali/guru, 13% sering mencuri, 11% sering memalak dan pernah dilaporkan bahwa sejumlah guru-guru di SD Negeri Bekasi memberikan jawaban soal kepada murid-muridnya ketika berlangsung EBANAS, karena menginginkan sekolahnya mendapatkan peringkat yang bagus dalam pencapaian rata-rata NEM.

Berdasarkan kutipan diatas, perilaku membohongi orang tua, atau bahkan menyontek seringkali dilakukan oleh peserta didik bahkan setiap kali ulangan perilaku menyontek itu dilakukan oleh peserta didik. Perilaku menyontek terjadi ketika ujian nasional berlangsung pihak guru membantu peserta didiknya untuk berlaku curang. Tanda-tanda kehancuran suatu bangsa yang terakhir, adalah adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama yang ditandai dengan perilaku perkelahian saling mengejek diantara siswa, kemudian diikuti dengan perilaku tawuran di kalangan remaja, serta tawuran antar desa sebagaimana yang dikutip oleh Megawangi (2004, hlm 9-10) yaitu

Dalam keluarga sering terjadi konflik, dimana murid-murid SMK-TI Bogor mengaku sering terlibat perkelahian fisik dengan saudaranya, di dalam kelas: saling mengejek antar kawan/persaingan tidak sehat. Di masyarakat tawuran antar sekolah di kalangan remaja, antar desa yang dilakukan oleh orang dewasa seperti kejadian di Lampung baru-baru ini antar suku seperti Kalimantan Barat, dan antar agama seperti di Ambon.

Berhubung kesepuluh tanda-tanda jaman tersebut sudah terjadi di Indonesia, maka kondisi terpuruknya Indonesia saat ini mungkin sejalan dengan pendapat Lickona tersebut. Sebuah peradaban akan menurun apabila demoralisasi pada suatu bangsa telah terjadi. Sepuluh tanda perilaku manusia dari perilaku manusia yang dikemukakan Lickona ini merupakan perilaku yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam interkasi sosial individu atau kelompok. Perilaku buruk ini tidak jarang pula menjadi pemicu dari konflik sosial, yang sering kali berujung pada kekerasan atau perilaku destruktif. Kita sering menyaksikan konflik sosial berupa perkelahian atau tawuran antar pelajar di kota-kota besar seperti, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makasar. Sebagaimana penelitian Dessynataliani (2006) dalam Sumantri (2012, hlm. 499) yang menjelaskan

Disekolah-sekolah, sering terjadi konflik antar pelajar atau di Indonesia dikenal dengan istilah bullying. *Bullying* merupakan tindakan negatif seperti melukai, atau mencoba membuat korban merasa tidak nyaman, dengan melakukan kekerasan secara fisik (pemukululan, tendangan, mendorong, mencekik, dll).

Kasus *Bulying* yang terjadi di sekolah di Bandung pada tahun 2014 melalui pembelajaran Portofolio mengasikkan data ternyata banyak siswa yang mengalami *bullying* ketika siswa tersebut menjadi siswa baru di sekolahnya. *Bullying* yang dialami berupa tindak kekerasan, seperti pemukulan atau lewat *bullying* verbal seperti kata-kata. Peneliti melakukan penelitian kepada siswa kelas VIII di salah satu sekolah di Kota Bandung pada tahun 2014 hasilnya "...kenakalan remaja seperti membolos, minum-minuman keras dan merokok seringkali dilakukan oleh siswa diluar pelajaran, ketika tidak ada pemantauan dari Guru...". Kekerasan di sekolah ternyata tak hanya terjadi salah satunya ketika masa orientasi sekolah, juga sepanjang tahun dengan beragam modus, intensitas, dan pelaku. Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad dalam KOMPAS, (11 Agustus 2012) yang menuliskan

Data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa dari 1.026 responden, 87,6 persen anak mengaku pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Dari persentase itu, 29,9 persen kekerasan dilakukan guru, 42,1 persen oleh teman sekelas, dan 28,0 persen oleh teman lain kelas

Kondisi tersebut memicu timbulnya cara berfikir yang merepleksikan kemerosotan watak, mental dan etika kebangsaan mentalitas berorientasi pada kekuatan dan kekerasan berdampak sulitnya penegakan dan kepastian hukum; persepsi yang sempit, dangkal, dan tertutup, sehingga kritik dan perbedaan pendapat masih diposisikan sebagai pertentangan dan mendorong kekuatan radikalisme bersinergi dengan paham *fundamentalisme*. Rendahnya penghormatan terhadap hukum dan nilai-nilai kemanusiaan pertanda merosotnya etika dan moral kebangsaan yang dapat menjadi pemicu munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Senada dengan pendapat tersebut Sunatra dalam Somantri, E (2012, hlm. 53) menjelaskan

Keberingasan sosial dapat dijadikan indikasi fenomena kemanusiaan yang tidak tercipta begitu saja, melainkan muncul karena perilaku sosial kalangan elite yang tidak mencerminkan pranata hukum, penegakan hukum tidak professional, bahkan terperangkap skenario elite politik,

anggota DPR yang seharusnya melindungi rakyat dari praktik tidak terpuji justru sebaliknya mendekam di teralis besi karena korupsi.

Berdasarkan kutipan diatas, terjadinya sebuah keniscayaan di lembaga pendidikan diajarkan anti korupsi, bahkan berbagai kalangan bersuara lantang anti korupsi, tapi orang-orang bangga menjadi koruptor namanya menjadi populis selepas dari penjara di sambut bagaikan pahlawan. Ini bertentangan dengan teori tabularasa dari John Locke. Dunia pendidikan di negeri kita telah melupakan tujuan utama pendidikan, yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Bagaimana dengan politik pendidikan Indonesia pada saat sekarang ini. David N. Plank dan William Lose Boyd (1994) (dalam Sumantri 2012, hlm. 164) yang menjelaskan

Politik pendidikan, pilihan institusi, serta antipolitik berkolerasi dengan tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan kepentingan publik. Dalam masyarakat modern, institusi pendidikan diharapkan menyelaraskan dengan tujuan dan kepentingan publik lewat tangan para pakar pendidikan.

Berdasarkan kutipan diatas, kekhawatiran dari Daniel Muh. Rosyid staf ahli menristek, kebijakan pendidikan yang tidak bermutu dan tidak kunjung berubah bisa jadi disengaja oleh para elite politik yang kini berkuasa di parlemen, sebab warga negara yang cerdas akan membuat posisi mereka mudah terancam, baik dari segi ekonomis maupaun politis. Faktanya dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap nilai dan perilaku penjabarannya. Hal yang lebih serius lagi bahwa pada kenyataannya nilai-nilai budaya yang disampaikan lewat proses pendidikan bukan nilai-nilai budaya yang disampaikan lewat proses pendidikan bukan nilai-nilai budaya yang diperlukan oleh anak didik kelak akan dewasa dan berfungsi dalam masyarakat, melainkan nilai-nilai konvensional yang sekarang berlaku yang dialami dan dipraktikkan oleh Orang tua dan guru mereka.

Hal tersebut menentukan nilai-nilai mana yang patut mendapatkan perhatian maka pertama kali harus dapat memperkirakan skenario dari masyarakat

di masa yang akan datang. Pendidikan juga hanya tidak sekedar mentransformasi nilai budaya, tetapi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan strategi khusus untuk memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dll.

Kajian terpenting dalam pendidikan multikultural adalah seorang Guru atau Dosen tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan. Seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti *demokrasi*, *humanisme*, dan *pluralisme* atau menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada siswa. Out-put yang dihasilkan dari sekolah/universitas tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain.

Berkaitan dengan masalah multikultural, Masdar Hilmy (dalam Abdullah, 2013, hlm. 35) mengungkapkan

Adanya keberagaman budaya bagi bangsa Indonesia merupakan suatu kenyataan sosial yang sudah menjadi keniscayaan. Meski demikian, hal itu secara tidak otomatis diiringi dengan penerimaan yang positif pula, bahkan, banyak fakta yang menunjukkan fenomena yang sebaliknya. Padahal secara psikologis harus diakui bahwa kesadaran multikultural masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat *given*, takdir Tuhan dan bukan faktor bentukan manusia.

Pendidikan multikultural yang dimiliki bangsa Indonesia mempunyai dua sisi potensi yang saling berlawanan. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah (2013, hlm. 36) yang menjelaskan

Satu sisi multikultural merupakan kekayaan khazanah budaya yang dapat dibanggakan. Namun di sisi lain, multikultural ini mempunyai potensi konflik yang disebabkan minimnya kesadaran untuk hidup bersama dalam keadaan penuh kedamaian, kasih sayang dan rasa kemanusiaan.

Berdasarkan kutipan diatas, ternyata minimalnya kesadaran multikultural tersebut, maka tidak mengherankan apabila terjadi hal-hal yang berujung kekerasan dan kedhaliman, seperti pembunuhan besar-besaran terhadap pengikut Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965, kekerasan terhadap etnis Cina di Jakarta pada bulan Mei tahun 1998 dan perang Islam-Kristen di Maluku Utara pada tahun 1999-2003. Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Abdullah (2013, hlm. 37) yang menjelaskan ...”peristiwa dan keadaan yang jauh dari rasa kemanusiaan tersebut, mendorong semua umat memiliki kesadaran multicultural yang sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan beragama...”. Berdasarkan kutipan diatas, rendahnya kesadaran multikultural di Indonesia, maka melalui pendidikan yang mengungkap tentang pendidikan multikultural mutlak diperlukan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kesadaran multikultural. Wacana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya didasarkan pada dua alasan berikut.

Pertama, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problem tentang eksistensi sosial, etnik dan kelompok keagamaan yang beragam. Problem tersebut menurut Asy'arie (2004, hlm. 5) disebabkan oleh adanya “...pengelolaan yang kurang baik terhadap keberadaan multi etnik, multi budaya, dan multi agama yang ada di Indonesia...” Indikatornya terlihat pada upaya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa orde baru sebagaimana yang dikutip oleh Azra (2002, hlm. 2). “...selama orde baru berkuasa, pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama, maupun budayanya. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pun diterapkan secara berat sebelah...” Berdasarkan kutipan tersebut, pada masa orde baru konsep bhinneka tunggal ika dilakukan secara tidak konsisten.

Kedua, adanya penekanan semangat ke-ika-an dari pada semangat ke-bhinneka-an dalam praktik pendidikan di Indonesia. Beberapa indikatornya sebagai berikut. Sebagaimana yang dikutip oleh (Zamroni, 2001, hlm. 10-12; Abdullah, 2001, hlm. 14; Mul Khan, 2001, hlm. 17-18; dan Mas'ud, 2004, hlm. 87-88)

(1) terjadinya penyeragaman kurikulum dan metode pembelajaran; (2) terjadi sentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, yang sarat dengan instruksi, petunjuk, dan pengarahan dari atas; (3) belum adanya proses menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang peserta didik yang menyangkut budaya, etnik, bahasa, dan agama; (4) proses pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri daripada keselamatan orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri; (5) terbatasnya ruang perbedaan pendapat antara guru dengan peserta didik, dan atau antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya; (6) fokus pendidikannya hanya pada pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid; (7) guru lebih sering menasihati peserta didik dengan cara mengancam; (8) guru hanya mengejar standar nilai akademik sehingga kurang memperhatikan budi pekerti dan moralitas anak, serta (9) kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan sosial dan ketajaman spiritualitas beragama.

Pendidikan yang telah lama berjalan tidak menunjukkan arah yang diharapkan. Justru pendidikan hanya dijadikan alat indoktrinasi berbagai kepentingan. Hal inilah yang merupakan akar masalah dehumanisasi pendidikan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa yang salah dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seharusnya menjadi tugas rumah bagi kita semua. Terdapat ada adagium menarik yang perlu direnungkan bersama yakni “ganti menteri ganti kebijakan” dan “menyelesaikan masalah, tambah masalah”. Dua adagium tersebut merupakan potret betapa kompleksitas masalah pendidikan kita mengukuhkan peribahasa “hilang satu tumbuh seribu”. Masalah-masalah tersebut senada dengan pendapat Maksum (2011, hlm. 9) yang mengungkapkan

Wacana mengenai pelanggaran konstitusi berupa amanat 20% yang harus dianggarkan pemerintah untuk sektor pendidikan dalam APBN menjadi topik paling hangat. Sebelumnya, juga ramai diperbincangan mengenai

kelas yang roboh, persoalan mahal nya biaya pendidikan, daya saing, mutu pendidikan, UU Guru dan Dosen, sertifikasi guru, dan lain sebagainya.

Sekian banyak masalah yang terjadi, wacana penambahan materi ujian nasional (UN) yang telah merampas masa depan anak-anak bangsa, menjadi topik hangat diberbagai media. Berbagai kalangan menyatakan ketidakpuasanya terhadap kebijakan UN yang nyata-nyata merugikan para siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Harahap (2006) dalam Maksun (2011, hlm. 9) yang memandang bahwa "...berbagai bentuk ekspresi pun ditunjukkan, di berbagai kota di Indonesia, aksi menentang kebijan UN semakin marak...". Pertanyaan logis yang kemudian muncul adalah apa sebenarnya penyebab berbagai masalah pendidikan nasional kita. Mengapa dari waktu ke waktu selalu muncul persoalan pendidikan, tapi seolah tak pernah bisa diselesaikan secara baik.

Berbagai persoalan pendidikan seperti disebutkan diatas hanyalah eksek dari tiadanya filosofi pendidikan sebagai landasan awal melangkah dan menyusun cetak biru pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah akhirnya terkesan tidak terintegrasi satu sama lain, atau berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan seperti ini, pad akhirnya, hanya akan menjadi polemik pendidikan, seperti tercermin dalam kebijakan UN. Mencermati penjelasan diatas, Maksun (2011, hlm. 10) memandang bahwa

Selama ini bangsa kita memang belum memiliki sebuah rumusan filosofi pendidikan yang memuat tujuan pendidikan yang tegas, terarah dan terencana dengan baik. Ketidak jelasan ini dapat tercermin dari Pasal (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20/2003. Tujuan pendidikan dalam UUSPN terlalu bersifat umum, tidak jelas arah. Karena tidak terarah akhirnya tujuan pendidikan tidak dapat dijabarkan peraturan perundang-undangan dibawahnya, juga tidak dapat menjadi panduan di lapangan dalam menghadapi persoalan pendidikan sehari-hari.

Berdasarkan kutipan diatas, akibatnya pada tataran penjabaran pendidikan di lapangan, semua *stakeholder* pendidikan berjalan dengan sistem nilai dan persfektinya masing-masing. Ketidakjelasan arah pendidikan tidak hanya membuat bingung masyarakat. Pemerintah sendiri sering terlihat gamang,

sehingga munculah anekdot, ganti menteri pendidikan ganti kebijakan. Mengingat kompleksitas masalah pendidikan dan urgensi perbaikan yang harus segera dilakukan, setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Maksum, (2011, hlm. 11) yaitu

Pertama, permusuan secara filosofi pendidikan. Ini akan menjadi kompas dalam menjalankan konsep dan praktik pendidikan sehari-hari. Kedua, peserta didik dan pendidik adalah tokoh sentral dalam dunia pendidikan. Artinya, maju mundurnya dunia pendidikan Indonesia sangat tergantung pada bagaimana kondisi dan kualitas dari peserta didik dan pendidiknya. Ketiga, Pendidikan harus bersifat sosial. Keempat, pembangunan pendidikan jangka panjang.

Berdasarkan kutipan diatas, selama puluhan tahun penyelenggaraan pendidikan, kita gamang dalam menterjemahkan konsep ke dalam praktik. Salah satu faktor determinan yang menyebabkannya adalah ketiadaan filosofi yang dapat dijadikan visi dalam pendidikan siswa/mahasiswa seperti apa yang ingin dihasilkan. Sebagai pendapat Maksum, (2011, hlm. 11) yang memandang bahwa “... Pancasila sebagai dasar negara dan semangat batin bangsa, patut untuk dijadikan sandaran perumusan filosofi bangsa...”. Berdasarkan kutipan tersebut, maka perumusan filosofi pendidikan harus berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara.

Pembicaraan dan pembuatan kebijakan pendidikan haruslah melibatkan dan menempatkan subjek pendidikan di dalam porsi yang sepantasnya. Pendidikan pun tidak bisa dilepaskan dari wacana masalah-masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pada akhirnya pendidikan harus disadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi yang buahnya tidak bisa langsung dipetik esok hari. Indonesia dengan berbagai macam persoalan diatas, pendidikan multikultural merupakan salah satu solusi dari berbagai macam masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa ini. Multikultur merupakan pendidikan relatif baru di dalam dunia pendidikan. Sejarah menuliskan sebelum perang dunia II boleh dikatakan pendidikan multikultural belum dikenal.

Pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan untuk memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok atau golongan yang berkuasa. Pendidikan multikultural merupakan gejala baru dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang. Penerapan strategi dan konsep pendidikan multikultural yang terpenting dalam strategi ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari, akan tetapi juga akan meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku *humanis, pluralis dan demokratis*.

Guru tidak hanya menguasai materi secara profesional tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti *humanisme, demokratis dan pluralisme*. Wacana pendidikan multikultural yang menjadi salah satu isu yang mencuat ke permukaan di era globalisasi seperti saat ini yaitu, bahwa pendidikan sebagai ruang transformasi budaya hendaknya selalu mengedepankan wawasan multikultural, bukan monokultural. Memperbaiki kekurangan dan kegagalan, serta membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan.

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif, pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang dan sistem pendidikan (SISDIKNAS) tahun 2003 pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa "...pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa... ". Berdasarkan kutipan tersebut penyelenggaraan pendidikan harus berprinsip pada suasana yang mendukung proses pembelajaran, seperti demokratis dan tidak diskriminatif.

Pendidikan multikultural juga didasarkan pada keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Khususnya dalam doktrin Islam, ada ajaran kita tidak boleh membedakan etnis, ras dan lain sebagainya. Manusia sama, yang membedakannya adalah ketaqwaan kepada Allah SWT. Berkaitan dengan

pendidikan multikultural hal ini mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan, dalam Islam tidak ada perbedaan dan pembatasan diantara manusia dalam haknya untuk menuntut atau memperoleh ilmu pengetahuan. Wajah *monokulturalisme* didunia pendidikan kita masih kentara sekali bila kita tilik dari berbagai dimensi pendidikan. Permasalahan kurikulum, materi pelajaran, hingga metode pengajaran yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar (PBM) diruang kelas hingga penggalan-penggalan terakhir dari abad ke-20. Merujuk kepada pendapat Tilaar (2004, hlm. 24) yang menjelaskan bahwa

Sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan keseragaman (*Etatisme*) lengkap dengan kekuasaan birokrasi yang ketat, bahkan otoriter. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan dari dalam dan luar negeri akan pendekatan yang semakin seragam dan demokratis terus mendesak dan perlu di implementasikan.

Berdasarkan kutipan diatas, diperlukan pendekatan pendidikan yang seragam dan bersifat demokratis. Berdasarkan prosesnya pendidikan multikultur ini tidak lepas dari sekolah sebagai wahana pendidikan dan menerapkan nilai-nilai multikultural. Proses pendidikan yang tidak bisa dilepaskan dari peram sekolah didalamnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pendidikan multikultur sebagai solusi untuk menghadapi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural yang menggunakan berbagai macam cara dan strategi pendidikan serta mengimplementasikanya yang mempunyai visi dan misi yang selalu menegakan dan menghargai *pluralisme, demokrasi dan humanisme*. Tujuanya para generasi penerus bangsa menjadi “generasi multikultural” yang menghargai perbedaan, selalu menegakan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kemanusiaan yang akan datang.

Pendidikan multikultural yang diimplementasikan di sekolah pembauran, merupakan bukti nyata dari pentingnya pendidikan multikultur di tengah berbagai perbedaan yang ada. SMP Taruna Bakti Bandung sebagai sekolah pembauran yang sejak pendiriannya 60 tahun yang lalu masih konsisten menerapkan konsep

lingkungan pembauran. Pembauran yang dilakukan diantaranya dengan menerima peserta didik yang memiliki keberagaman baik dari segi agama, ras, budaya, gender, umur maupun strata sosial. SMP Taruna Bakti Bandung tetap konsisten hingga sekarang menerapkan sekolah pembauran dengan menerima siswa dari berbagai daerah yang tentu saja memiliki keunikan atau ciri khas budaya dan latar belakang yang berbeda.

Hal tersebut sejalan dengan visi SMP Taruna Bakti Bandung, yaitu memberikan pelayanan pembelajaran terpadu, yaitu sinergi kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dalam lingkungan sekolah pembauran. Adapun SMP Taruna Bakti memiliki misi yaitu sebagai berikut

1. Membentuk mental spiritual siswa yang tangguh dilandasi iman dan taqwa
2. Menumbuhkan 7 nilai dasar: Jujur, Tanggung Jawab, Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil dan Peduli
3. Menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur sehingga dapat berkompetensi secara global
4. Menumbuhkan sikap aktif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bakat yang dimiliki siswa
5. Mengajarkan ilmu pengetahuan dengan wawasan teknologi modern dalam lingkungan belajar yang kondusif
6. Mewujudkan suasana pembauran dengan memberikan pelayanan, kesempatan, dan bimbingan belajar yang sama kepada semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan etnis tertentu.

Berikut akan disajikan tabel data awal penelitian di objek penelitian, sebagai berikut

Tabel 1.1 Kondisi Multikultur di SMP Taruna Bakti

No	Kondisi	Keterangan	Prosentase
1.	Agama	1. Islam	1. 59%

		2. Protestan	2. 31%
		3. Hindu	3. 5%
		4. Budha	4. 0%
		5. Katholik	5. 5%
2.	Suku Bangsa/Asal Daerah	1. Jawa	1. 31%
		2. Sunda	2. 47%
		3. Bali	3. 1%
		4. Batak	4. 10%
		5. Makasar	5. 6%
		6. Etnis Cina	6. 5%
3.	Status Sosial	1. Kalangan kelas atas	1. 70%
		2. Kalangan kelas menengah atas	2. 30%
		3. Kalangan kelas bawah	

Sumber: diolah peneliti (2015)

Konsep pembauran dalam pendidikan sebagaimana yang diterapkan di sekolah pembauran SMP Taruna Bakti Bandung memiliki keunikan tersendiri dengan sekolah lainnya, karena keberagaman yang terdapat di dalamnya baik secara agama, suku daerah, ras, etnik maupun bahasa. Keberagaman ini ditunjukkan dengan membaurnya siswa satu dengan yang lainnya tercermin dalam sikap dan perbuatan keseharian. SMP Taruna Bakti tercatat sebagai sekolah RSBI dimana menyelenggarakan layanan pendidikan untuk siswa reguler, bilingual dan akselerasi.

SMP Taruna Bakti yang mengusung tema tentang sekolah pembauran, tentu saja menghadapi masalah diantaranya siswa non muslim yang semakin

sedikit di bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tingkat kepercayaan Orang tua non muslim untuk menyekolahkan anaknya di SMP Taruna Bakti menurun di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan kasus ini hanya terjadi pada siswa non muslim saja. Pemaparan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Masalah yang kedua, adalah kasus *bullying* yang masih terjadi di SMP Taruna Bakti Bandung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 melalui pembelajaran portofolio, ternyata siswa kelas VII sering mengalami *bullying* seperti *bullying* verbal. *Bullying* verbal, seperti disebut cina, sipit, jelek, hitam, pendek dll. Siswa yang mengalami *bullying* tersebut merasa telah didiskriminasikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami gejala-gejala manusia (siswa) yang terjadi di SMP Taruna Bakti. Penelitian ini dibimbing oleh paradigma sebagai sebuah proses penelitian untuk memahami masalah-masalah dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, paradigma di masyarakat menilai bahwasanya SMP Taruna Bakti merupakan sekolah Cina yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang etnis Cina saja, tetapi pada saat ini setelah 56 tahun SMP Taruna Bakti Bandung berdiri etnis Cina semakin berkurang karena didominasi oleh orang pribumi, tetapi tidak semata-mata menghilangkan paradigma masyarakat yang menyimpulkan bahwa SMP Taruna Bakti merupakan sekolah etnis Cina.

Berangkat dari paradigma tersebut penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji konsep pembauran dalam pendidikan di SMP Taruna Bakti Bandung untuk mengkaji nilai-nilai multikultur siswanya yang selalu menegakan *pluralisme*, demokrasi dan *humanisme*.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Batasan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mencakup bagaimana implementasi pembauran pendidikan yang dilaksanakan oleh SMP Taruna Bakti

dalam mengembangkan nilai-nilai multikultural siswa. Peneliti akan menguraikan tentang sistem pendidikan pembauran dan bagaimana penerpanya serta implemtasi nilai-nilai multikultural. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi pembauran sosial dalam pendidikan untuk mengembangkan nilai-nilai multikultur siswa.”Pembatasan masalah meliputi strategi dan kosnsep pendidikan pada sekolah pembauran, perencanaan implementasi dan evaluasi kurikulum, serta upaya yang dilakukan sekolah, Orang tua, dan siswa dalam penyelenggaraan sekolah pembauran dalam konteks pendidikan multikultur.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu: “Bagaimana implementasi pembauran sosial dalam pendidikan untuk mengembangkan nilai-nilai multikultural siswa?”

Fokus penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa sub-sub masalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan strategi dan konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman pada siswa di sekolah pembauran?
2. Bagaimana pengembangan kurikulum diSMP Taruna Bakti dilihat dari perspektif multikultural, baik dari aspek dasar pengembangan maupun tahapan-tahapannya, yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum?
3. Bagaimana upaya Sekolah, Orang Tua dan Siswa agar sekolah pembauran dapat mengimplementasikan dan mengembangkan nilai-nilai multikultural siswa?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembauran sosial dalam pendidikan untuk mengembangkan nilai-nilai multikultural siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengambil kebijakan supaya konsep pendidikan pembauran dapat terus dilaksanakan dan mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Tujuan umum tersebut dijabarkan kedalam tujuan secara khusus, yaitu untuk

1. Mengevaluasi bagaimana penerapan strategi dan konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman pada siswa di sekolah pembauran?
2. Menemukan pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SMP Taruna Bakti jika dilihat dari perspektif multikultural, baik dari aspek dasar pengembangan maupun tahapan-tahapannya, yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi?
3. Mendeskripsikan bagaimana upaya berbagai pihak agar pendidikan pembauran dapat mengembangkan nilai-nilai multikultural siswa?

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoritik dan praktis. Adapun manfaat–manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan teori pendidikan multikultur melalui lingkungan sekolah pembauran sebagai upaya untuk mengembangkan nilai-nilai multikultural siswa yang meliputi aspek *humanisme*, demokratis dan *pluralisme*.

2. Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk mengembangkan lingkungan sekolah pembauran agar tercipta suasana pendidikan yang menghargai nilai-nilai multikultural siswa
- b. Bagi sekolah, penelitian ini berguna terutama dalam upaya menciptakan kebijakan sekolah sebagai sarana interventif dalam mengarahkan kegiatan

- pembelajaran sebagai sekolah pembauran sebagai implementasi nilai multikultural siswa
- c. Bagi guru mata pelajaran, penelitian ini berguna sebagai balikan (*feedback*) sehingga dalam program pendidikan selalu terarah kepada pendidikan multikultural
 - d. Bagi siswa, penelitian ini berguna agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan senantiasa terarah pada program-program yang bernilai positif untuk diri sendiri, organisasi, masyarakat bangsa dan negara.
 - e. Bagi aksi sosial, peneliti ini berguna sebagai pencerahan dan pengalaman hidup dan memberikan gambaran bahwa pada sekolah pembauran sikap toleransi merupakan sebuah sikap yang harus dipupuk sebagai pengimplemntasian nilai sila-sila Pancasila.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dalam tesis ini yaitu terdiri dari: Bab 1 yaitu pendahuluan. Bab II kajian teori, Bab III metodologi Penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan dan bab V, yaitu simpulan dan saran. Adapun Sistematika secara khusus dijelaskan sebagai berikut: Bab I, yaitu pendahuluan. Merupakan bagian awal dari penelitian, dalam bab ini terbagi-bagi dalam beberapa sub bab seperti: latar belakang masalah, yang berisikan mengenai alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data-data, referensi dan temuan penelitian sebelumnya.

Bab I juga mencakup uraian tentang gejala-gejala kesenjangan antara harapan kenyataan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk menetapkan permasalahan dan bagaimana penelitian dapat mengisi kekosongan penelitian berkaitan dengan topik yang diteliti; Penjelasan atau kemungkinan terjadinya kompleksitas masalah apabila masalah itu dibiarkan sehingga akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam; Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis;

Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam lingkup bidang studi yang ditekuni oleh peneliti.

Selain latar belakang masalah, dalam penelitian ini terdapat pula identifikasi masalah penelitian, yaitu berupa pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dibuat agar penelitian menjadi lebih terfokus. Tujuan penelitian bertujuan untuk menyajikan hal yang ingin dicapai setelah melaksanakan penelitian. Terdapat pula manfaat penelitian, berupa manfaat/signifikansi dari segi teori (mengatakan apa yang belum atau kurang diteliti dalam kajian pustaka yang merupakan kontribusi penelitian); manfaat/signifikansi dari segi kebijakan (membahas perkembangan kebijakan formal dalam bidang yang dikaji dan memaparkan data yang menunjukkan betapa seringnya masalah yang dikaji muncul dan betapa kritisnya masalah atau dampak yang ditimbulkannya); manfaat/signifikansi dari segi praktik (sama dengan argument untuk signifikansi terhadap kebijakan).

Argumen didasarkan pada pembahasan atau masalah yang dikemukakan dalam kajian pustaka, melibatkan kutipan dari para ahli, referensi penelitian sebelumnya, dan data yang ada); manfaat signifikansi dari segi isu serta aksi sosial (penelitian mungkin bisa dikatakan sebagai alat untuk memberikan pencerahan pengalaman hidup dengan memberikan gambaran dan mendukung adanya aksi). Struktur organisasi tesis, berupa bagian rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dalam tesis, mulai bab pertama hingga bab terakhir.

Bab II, berisi kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka mempunyai peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka ditunjukkan “*thestateoftheart*” dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Kajian pustaka berisi:

- a. Konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji;
- b. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya;
- c. Posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, yaitu metode penelitian. Bab ini merupakan pengajaran lebih rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Lebih jelasnya yaitu langkah–langkah apa saja yang akan ditempuh dalam penelitian, sub bab selanjutnya terdapat pula pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, instrument penelitian, tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, merupakan pembahasan. Pada bab ini berisikan hasil penelitian, dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil–hasil data yang telah diolah peneliti serta adanya analisis dari hasil penegelolaan tersebut. Sebagaimana pendapat, Burton (2002:71), yaitu “...Peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian, temuan utama yang dihasilkan dari analisis data dan apakah temuan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan...”. Pada bab pemaparan data sebaiknya dimulai dengan ringkasan singkat mengenai temuan penelitian, dengan mengatakan kembali tujuan penelitian.

Bab V, Simpulan dan Saran berisi penyajian penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Simpulan berisi uraian padat, simpulan harus menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Saran atau rekomendasi yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecah masalah di lapangan atau *follow up* dari hasil penelitian.